

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

**OLEH  
KRISDIANTO  
NIM 105730475014**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

***ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA***

**SKRIPSI**

**OLEH  
KRISDIANTO  
NIM 105730475014**



***PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019***

## PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu yang saya sangat sayangi.
- Kakak-kakakku serta keluargaku yang selalu memberikan motivasi.
- Teman-teman seperjuangan AK3-14 yang selalu kompak.
- Semua dosen yang tiada henti memberi ilmu pengetahuan.
- Almamaterku.

### MOTTO HIDUP

”Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”

(QS. An-Najm: 39-40)

“Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya.

Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.”



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : KRISDIANTO

NIM : 10573 04750 14

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Jamaluddin M., S.E., M.Si.  
NIDN: 2006117201

  
Eaidhul Adzheim, S.E., M.Si.  
NIDN: 0921018002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

NBM 10733425



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

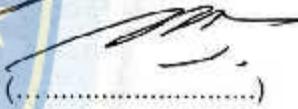
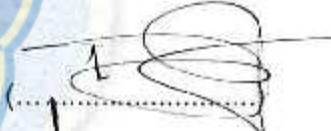
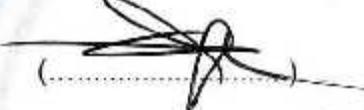
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **KRISDIANTO**, NIM: **10573 04750 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 130/Tahun 1440 H/2019 M, tanggal 23 Dzulhijjah 1440 H/24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H  
24 Agustus 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M.   
2. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si. Ak. CA.   
3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA.   
4. Samsul Rizal, S.E., M.M. 

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISDIANTO

Stambuk : 10573 04750 14

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H  
24 Agustus 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,

  
Krisdianto

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA.CSP.  
NBM : 107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Di kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Dg Kulle dan ibu Nurbiah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Faidhul Adziem, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak / Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



## ABSTRAK

Krisdianto (2019), analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jamaluddin M, sebagai pembimbing I, Faidhul Adziem, serbagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kab Gowa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data pajak dan data retribusi daerah sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah berupa data atau laporan pajak dan retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017(5 tahun) dan data penerimaan pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi yaitu mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di kabupaten gowa. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan perhitungan statistik dengan spss, analisis data yang digunakan adalah regresi berganda, adapun uji data yang digunakan yaitu: auto korelasi model, uji multikolinearitas, uji regresi linear dan analisis determinasi koefisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerahberpengaruh yang positif dan signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 98,2% sedangkan nsisinya 1,8% merupakan besarnya pengaruh darifaktor lain di luar kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

## ABSTRACT

**Krisdianto (2019), analyzes the contribution of regional taxes and regional levies to increasing regional income. Jamaluddin M, as mentor I, Faidhul Adziem, as supervisor II.**

This study aims to determine whether regional taxes and regional levies have an effect on increasing regional original income in Gowa District. This research is a type of descriptive research with a quantitative approach. The population in this study is overall tax data and regional retribution data while the sample in this study is in the form of data or reports on regional taxes and levies from 2013 to 2017 (5 years) and data on regional revenue from 2013 to 2017. Research This uses the Documentation method, which is collecting data on regional revenue from local taxes and levies in Gowa Regency. The analytical method used is using statistical calculations with SPSS, data analysis used is multiple regression, while the data test used is: auto correlation model, multicollinearity test, linear regression test and analysis of the coefficient determination.

The results of the study indicate that the contribution of regional taxes and regional levies on regional original income has a positive and significant effect. From the results of the study indicate the magnitude of the effect of the contribution of Regional Taxes and Regional Retribution on Regional Original Revenues is 98.2%, the percentage is 1.8% is the magnitude of the influence of other factors outside the contribution of Regional Taxes and Regional Levies.

**Keywords: regional tax, regional retribution and local revenue.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9

1. Teori Atribusi .....	9
2. Pajak .....	11
a. Pengertian pajak.....	11
b. Pengklasifikasian pajak .....	12
c. Fungsi pajak .....	14
3. Pajak daerah .....	15
a. Pengertian pajak daerah.....	15
b. Jenis-jenis pajak daerah .....	16
c. Objek pajak daerah.....	17
d. Subjek pajak daerah .....	17
e. Fungsi pemungutan pajak daerah.....	19
f. Tahapan sistem dan prosedur pajak daerah.....	21
4. Retribusi daerah.....	25
a. Pengertian retribusi daerah.....	25
b. Jenis-jenis Retribusi daerah.....	25
c. Ciri-ciri retribusi daerah.....	26
5. Pendapatan asli daerah.....	27
6. Sumber pendapatan asli daerah.....	28
B. Tinjauan Empiris .....	30
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Hipotesis .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
C. Jenis Dan Sumber Data .....	41

D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Definisi Operasional Variabel Dan Variabel Operasional .....	42
F. Populasi Dan Sampel.....	43
G. Metode Analisis.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Singkat.....	45
2. Visi, Misi.....	49
3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas.....	52
a. Struktur organisasi.....	52
b. Tugas Dan Tanggung Jawab.....	52
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Hasil Uji Data.....</b>	<b>62</b>
a. Auto Korelasi Model.....	62
b. Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
c. Uji Regresi Linear.....	64
d. Analisis Determinasi Koefisien.....	66
<b>D. Pembahasan.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 pajak daerah.....	3
2. Tabel 1.2 retribusi daerah .....	5
3. Tabel 2.1 penelitian terdahulu .....	32
4. Tabel 4.1 pajak daerah.....	59
5. Tabel 4.2 retribusi daerah .....	60
6. Tabel 4.3 pendapatan asli daerah .....	61
7. Tabel 4.4 hasil perhitungan korelasi.....	62
8. Tabel 4.5 hasil perhitungan korelasi.....	63
9. Tabel 4.6 hasil perhitungan regresi linear.....	64
10. Tabel 4.7 hasil analisis regresi .....	65



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 kerangka pikir ..... 39
2. Gambar 4.1 struktur organisasi ..... 51



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan diberbagai sektor, karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri dana yang didapat maupun dari luar negeri berupa utang luar negeri sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapat terbesar adalah perpajakan. Sektor perpajakan mampu meningkatkan pembangunan di Indonesia lebih dari 50% dari pada sektor-sektor lainnya (Tiono, 2013)

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah diatur dalam undang-undang (Kasasih & Murniati, 2017). pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Pemerintahan disuatu negara tidak akan bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk Negara Indonesia (Widodo & Puspita, 2010).

Di Kab.Gowa Pajak daerah dan retribusi daerah mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi

daerah menghasilkan perbedaan penerimaannya yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan PAD antarpemerintah daerah tidak selalu merepresentasikan potensinya akibat persaingan pajak (tax competition) antardaerah. Demikian pula, perbedaan belanja antarpemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (expenditures competition). Dalam era perdagangan bebas, persaingan antarpemerintah daerah ini akan semakin kuat terutama dalam merebut peluang bisnis dalam menarik investasi (Nugroho, 2013)

Pengertian dari pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Kasasih & Murniati, 2017).

Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah provinsi. Sedangkan, pajak daerah Kabupaten/Kota sebagai kewenangan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang

burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014). Berikut adalah tabel penerimaan pajak daerah dari tahun 2013-2017 yang dijabarkan dalam tabel 1.1

**Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	42,751,000,000	57,153,602,844	14,402,602,844	133,69%
2014	59,040,000,000	63,143,326,430	4,103,326,430	106,95%
2015	65,030,000,000	74,023,000,000	8,993,000,000	113,82%
2016	69,648,135,430	79,021,434,236	79,021,434,236	120.32%
2017	71,813,135,430	83,140,617,999	11,890,533,906	115.77%

**Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**

Berdasarkan tabel 1.1 komponen pajak daerah dalam kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdiri dari target pajak, realisasi pajak, selisih dan pencapaian yang timbul sebagai kebijakan laporan anggaran laporan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Dari data dapat disimpulkan bahwa komponen pajak daerah atas pada tahun 2013 pencapaian pajak memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi factor utama dalam penerimaan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kab. gowa.

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang terbentuknya PAD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi

hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah retribusi daerah (Hasibuan, 2014).

Pengertian dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelolaan retribusi berbeda dengan dengan penggolongan pajak itu sendiri. Karena retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 108 ayat (1) terdiri dari Jasa umum, Jasa usaha, Perizinan tertentu. Jadi dalam retribusi daerah jasa dan adanya retribusi daerah langsung dapat ditunjuk. Misalnya, retribusi pasar dibayar karena adanya penggunaan ruang pasar tertentu oleh pembayar retribusi (Hasibuan, 2014) Berikut adalah tabel penerimaan retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Yang dijabarkan dalam tabel 1.2.

**Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	28,285,036,699	37,208,348,059	8,990,361,361	131,55%
2014	38,093,621,411	65,745,402,114	27,651,780,703	172,59%
2015	49,189,123,000	57.356.765.000	8,167,640,000	116,60%
2016	84,196,838,547	64,454,029,027	(19,742,809,520)	76.55%
2017	74,151,242,311	50,910,398,136	(22,895,144,175)	68.66%

**Sumber data: laporan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa**

Berdasarkan tabel 1.2 komponen retribusi daerah dalam kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdiri dari target retribusi, rialisasi retribusi, selisi dan pencapaian yang timbul sebagai kebijakan laporan anggaran laporan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Dari data dapat disimpulkan bahwa komponen retribusi daerah atas pada tahun 2014 pencapaian retribusi memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi factor utama dalam penerimaan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kab. gowa.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah(Kurniawan, S. (2014)).

Kabupaten Gowa adalah salah satu dari Kabupaten/Kota Daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten Gowa dan potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kabupaten Gowa, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Gowa melalui BKD (Badan Keuangan Daerah) berupaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gowa dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Penggalan pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya dari potensi yang dimiliki Kabupaten Gowa. Dalam hal ini penerapan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi di Kabupaten Gowa harus benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Karena hasil dari pembayaran pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembangunan sarana-sarana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa (Kusuma & Wirawati, 2013)

Apabila pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan dan dikelola dengan tepat, maka dapat dipastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi dapat memberikan peranan yang terus meningkat bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah Kabupaten

Gowa. Berbicara tentang pajak tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum adanya pungutan berupa pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah setempat. (Dwi kurniawan, 2014)

Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola sebaik-baiknya yaitu secara transparan dan akuntabel, sehingga menunjang pembangunan daerah Kabupaten Gowa. Walaupun penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar, namun pengelolaannya dan penerapan perdanya perlu diawasi. Sejatinya Perda Pajak daerah dan retribusi daerah harus diterapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini yang menjadi tanda tanya apakah Perda yang ada di Kabupaten Gowa benar telah diterapkan berdasarkan amanat undang-undang tersebut. Pengelolaan terhadap pajak dan retribusi daerah yang kurang transparan dalam arti keterbukaan informasi kepada publik sejatinya dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di dalam mengelolah keuangan daerah dalam hal ini Pendapatan Asli daerah. Serta kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri terhadap PAD. Maka dari itu, saya merasa perlu melakukan suatu penelitian tentang **"ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GOWA"**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut yaitu “Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kab Gowa?(2013-2017)”

## **C. Tujuan**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kab Gowa”.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Penulis berharap dapat menambah literatur empiris tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kab. Gowa dan dapat memberikan masukan/informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai tambahan informasi tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli Kab. Gowa.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Atribusi**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (kurnia fikriningrum, 2014)

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendalipribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan

atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal (kurnia fikriningrum, 2014)

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (kurnia fikriningrum, 2014)

## **2. Pajak**

### **a. Pengertian pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sebuah negara. Pemerintah

di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk Negara Indonesia (Widodo & Puspita, pajak bumi dan bangunan untuk pajak produksi, 2010).

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ada timbal balik langsung (Pertwi, Azizah, & Kurniawan, 2014).

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014).

Pernyataan lain menyebutkan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Puspita dewi & Hidayati, 2016).

Sedangkan berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan pengertian di atas maka pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah dan bersifat memaksa yang nantinya akan dikembalikan oleh pemerintah berupa infrastruktur yang akan dinikmati bersama.

b. Pengklasifikasian pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Kurniawan, 2014).

1) Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung:

a) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak bersangkutan, contoh: pajak penghasilan, pajak penghasilan dibayar dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan orang lain atau pihak ke tiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang pajak,

misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai.

## 2) Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

### a) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjek. Contoh: pajak penghasilan

### b) Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

## 3) Menurut lembaga pemungutan

### a) Pajak negara atau pajak pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak:

### 1). Pajak penghasilan

- 2). Ppn
- 3). Pajak bumi dan bangunan
- 4). Bea materi
- 5). Bea lelang

Pajak yang di pungut bea cukai (Dirjen bea cukai)

- 1) Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- c. Fungsi pajak

Ada fungsi yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut(Kurniawan, 2014).

- 1) Sumber keuangan negara

Fungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

- 2) Fungsi Mengatur atau non budgetair

Usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

### 3. Pajak daerah

#### a. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Hikmah, 2017).

Sedangkan menurut UU No 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### b. Jenis-jenis pajak daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri dari :

##### 1) Pajak provinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi meliputi:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2) Pajak kabupaten/kota

Pajak kabupaten/kota merupakan pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota meliputi :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral logam dan bukan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walit
- j) Pajak bumi dan bangunan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

c. Objek pajak daerah

Undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang-undang nomor 34 tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan

Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan

merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak(Kurniawan, 2014).

Dalam skripsi Septian Dwi Kurniawan (2014), azas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Harus ada kepastian hukum
- 2) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- 3) Masalah pajak harus jelas
- 4) Barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a) Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retibusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban rill dalam arti kepuasan yang hilang.

b) Prinsip kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c) Prinsip kecocokan

Pajak jangan sampai menekan wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

e. Fungsi pemungutan pajak daerah antara lain:

1. **Fungsi *budgetair***, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas daerah (Pendapatan Asli Daerah). Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

**Contoh** : Dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

2. **Fungsi *regulerent***, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

**Contoh:** pajak air tanah, pajak mineral non logam dan batuan.

3. **Fungsi alokasi**, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.

4. **Fungsi distribusi**, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak, yaitu wajib pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

f. Tahapan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah

1. *Self Assessment System*

a) Pendaftaran (untuk memperoleh NPWPD)

1. Menyiapkan formulir pendaftaran.
2. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa.

4. Formulir/kartu dan daftar.

b) Pendataan

1. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak.

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.

3. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak *self assessment*.

4. Formulir dan daftar SPTPD.

c) Penetapan

1. Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam kartu data.

2. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.

3. Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.

4. Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar surat ketetapan pajak daerah tersebut.

5. Surat ketetapan ditandatangani oleh kepala unit kerja penetapan.
6. Menyerahkan copy daftar surat ketetapan tersebut kepada unit kerja penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.
7. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.

d) Penyetoran

Melalui bendahara khusus Penerimaan (BKP)

1. BKP menerima setoran disertai SPTPD/SKPD dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah).
2. Setelah SSPD tersebut dicap, aslinya disertai SPTPD/SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan.
3. Berdasarkan SSPD yang telah dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
4. BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran Bank.
5. BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
6. Mendistribusikan melalui kas daerah

1. Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank.
  2. Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan kembali ke wajib pajak.
  3. 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank.
  4. BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
  5. BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda.
  6. Mendistribusikan.
- e) Penagihan
1. Penagihan dengan surat teguran.
  2. Penagihan dengan surat paksa.
  3. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.
  4. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang.
  5. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang.

6. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS).

## 2. *Official Assessment System*

Pada dasarnya prosedur untuk *Official Assessment System* sama dengan *Self Assessment System*. Perbedaannya terletak pada proses pendataan yaitu menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak dan proses penetapan pajak daerah terutang.

Pada *Self Assessment System*, SPTPD digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk menyetor pajak yang terutang. Setelah pajak daerah disetor oleh Wajib Pajak, dilakukan penghitungan jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak dalam kartu data oleh fiskus. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar penetapan apakah lebih bayar (SKPDLB), kurang bayar (SKPDKB), atau sesuai/Nihil (SKPDN).

Sementara pada *Official Assessment System*, SPTPD yang diisi Wajib Pajak digunakan sebagai dasar mengisi kartu data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah pajak daerah yang harus dibayar. Dari data SPTPD itulah kemudian ditetapkan SKPD sebagai dasar penyetoran pajak terutang.

## 4. **Retribusi daerah**

### a. Pengertian retribusi daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau kepentingan yang juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.

Pengertian lain dari retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun maupun tidak langsung (Hasibuan, 2014).

b. Jenis-jenis retribusi daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Ifa, 2017).

1) Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- a) Retribusi pelayanan pasar
- b) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- d) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- e) Retribusi pengujian kapal perikanan
- f) Retribusi pelayanan kesehatan
- g) Retribusi pelayanan persampahan ataupun kenersihan
- h) Retribusi Penggantian suatu Biaya cetak KTP (kartu tanda penduduk) serta juga Akte suatu Catatan Sipil.

2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
  - c) Retribusi tempat pelelangan
  - d) Retribusi terminal
  - e) Retribusi penyedotan kakus
  - f) Retribusi rumah potong hewan
  - g) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Ciri-ciri retribusi daerah

Retribusi daerah memiliki ciri-ciri antara lain ialah sebagai berikut (Wahyu, Suprijanto, & Pranaditya, 2017):

- 1) Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah.
- 2) Di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Terdapatnya kontroprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- 4) Retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara

## 5. Pendapatan asli daerah

Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besarnya pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah. potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Peningkatan peran atau porsi PAD dan APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Susilawati & Riharjo, 2014).

Pendapatan asli daerah merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah pendapatan asli daerah merupakan merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah (Taras & Sri Artini, 2017).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Wahyu, Suprijanto, & Pranaditya, 2017).

Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menguraikan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan

daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hikmah, 2017).

#### **6. Sumber pendapatan asli daerah**

Sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatanyaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu sebagai berikut:
  - a) Pajak propinsi
  - b) Pajak kabupaten/kota
- 2) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
  - a) Retribusi jasa umum
  - b) Retribusi jasa usaha
  - c) Retribusi perizinan tertentu
- 3) Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
  - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan pajak daerah yang berasal dari lain lain milik pemerintah daerah. jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- a) Jasa giro
  - b) Pendapatan bunga
  - c) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - d) Pendapatan denda pajak

## **B. Tinjauan Empiris**

Felicia Tiono (2013), dalam penelitiannya yang berjudul analisis perlakuan pajak dan retribusi daerah pada hotel "X" di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh hotel X telah memenuhi syarat untuk menjadi biaya fisik.

Adi nugroho (2013), dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi jawa periode 2012-2013. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa: 1) Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah; 2) Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah dan 3) Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah, dengan nilai R-square yang disesuaikan 47,8%.

Anggar Kusuma & Putu Wirawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD sekabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.

Dwi Kurniawan (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli di kabupaten ponorogo. Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,873.

Jenny Morasa dan Dhullo Afandi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis perlakuan pajak daerah di Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan memadai karena telah sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan.

Regina Usman (2015), dalam penelitian yang berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Yani Wati (2016), dalam penelitian yang berjudul Analisis perlakuan pajak dikuta timur resort Denpasar Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan jurnal untuk pajak telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajak namun Kuta Timur Resort membutuhkan seorang accounting yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi yang ada serta membuat jurnal.

Billclin dan Stanley Kho Walandouw (2016) dalam penelitian yang berjudul analisis penerapan pajak daerah pada badan pengelola keuangan dan badan milik daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak di Kota tomohon telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu dengan menggunakan Buku penerimaan pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya.

Lintje Kalangi & Treesje Runtu (2016), dengan judul penelitian analisis efektifitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di siau tagulandang biaro.mengacu pada analisis efektifitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup

efektif. Dan analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Hikmah, (2017) dengan judul penelitian analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pajak daerah pengaruh secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 70,69% dengan kategori besar, (2) retribusi daerah berpengaruh sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 11,21 % dengan kategori kecil, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 108,01% % dengan kategori sangat efektif dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 106,515 dengan kategori sangat efektif.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Felicia Tiono/2013	analisis perlakuan pajak dan retribusi daerah pada hotel "X" di Surabaya	Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif	Semua pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh hotel X telah memenuhi syarat untuk menjadi biaya fisik.
2	Adi nugroho (2013)	analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan	Data yang digunakan dalam penelitian ini	menunjukkan bahwa: 1) Penambahan pajak daerah berpengaruh

		asli daerah kabupaten/kota di provinsi jawa periode 2012-2013.	adalah data deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah; 2) Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah dan 3) Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah, dengan nilai R-square yang disesuaikan 47,8%.
3	Anggar Kusuma & Putu Wirawati (2013)	analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan tertibasi daerah terhadap peningkatan PAD	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah	penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli

				daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.
4	Dwi Kurniawan (2014)	pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan sli di kabupaten ponorogo	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,90 dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,873.
5	Jenny Morasa dan Dhullo Afandi/2015	analisis perlakuan pajak daerah di Kota Tomohon.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan memadai karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang

				standar akuntansi keuangan.
6	Regina Usman (2015),	pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bandung.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	signifikan secara simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
7	Yani Wati/2016	Analisis perlakuan akuntansi pajak dikuta timur resort Denpasar Bali	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Pencatatan jurnal untuk pajak telah sesuai dengan perlakuan akuntansi pajak namun Kuta Timur Resort membutuhkan seorang accounting yang bertujuan untuk mencatat semua transaksi yang ada serta membuat jurnal.

8	Lintje Kalangi & Treesje Runtu (2016)	analisis efektivitas kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di siau tagulandang biaro.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	mengacu pada analisis efektivitas Pajak Daerah sangat efektif sedangkan Retribusi Daerah cukup efektif. Dan analisis komparatif menunjukkan bahwa Retribusi Daerah lebih mendominasi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9	Billclin dan Stanley Kho Walandouw /2016	analisis penerapan akuntansi pajak daerah pada badan pengelola keuangan dan badan milik daerah Kota Tomohon.	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Penerapan akuntansi pajak di Kota Tomohon telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu dengan menggunakan Buku penerimaan pendapatan PPKD untuk membukukan pajak yang diterimanya.
10	Hikmah/2017	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata</li> </ul>

		batam.	kuantitatif.	<p>persentase kontribusi sebesar 70,69% dengan kategori besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 11,21 % dengan kategori kecil.</li> <li>• efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 108,01% % dengan kategori sangat efektif.</li> <li>• efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 106,515 dengan kategori sangat efektif.</li> </ul>
--	--	--------	--------------	--

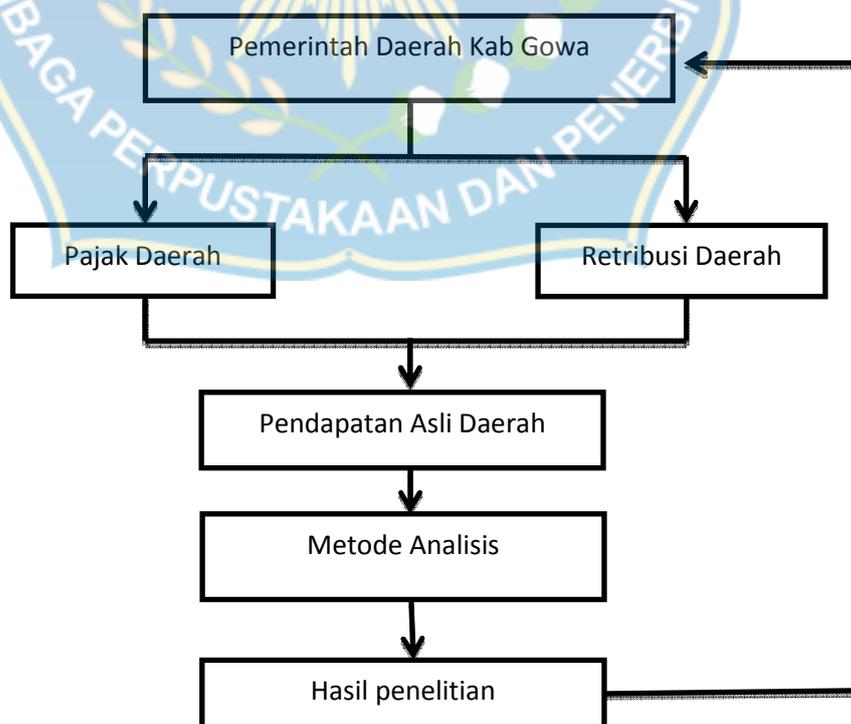
### C. Kerangka konsep

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang di peroleh dari: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menjelaskan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan penunjang bagi meningkatnya pendapatan asli (PAD) di pemerintahan Kabupaten Gowa. Untuk itu peneliti membutuhkan data penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. setelah data diperoleh, maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Berikut adalah kerangka pikir yang akan dijadikan penulis sebagai acuan penelitian.gambar 2.1

kerangka pikir



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian agar dapat mempermudah dalam menganalisis. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil acuan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angga kusuma & Putu wirati (2013) hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian penelitian ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017) hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata persentase sebesar 70,69% sedangkan retribusi daerah berpengaruh sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata persentase persentase kontribusi 11,21% dengan kategori kecil. Berdasarkan acuan tersebut diatas maka peneliti ingin mengambil kembali hipotesis diduga bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## **BAB III**

### **Metode penelitian**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif karena data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang bersifat sistematis dan berupa angka-angka yang berhubungan dengan masalah yang diajukan oleh penulis.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dalam skripsi ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kab Gowa Jl. Tumanurung raya waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.(februari sampai dengan april 2019).

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Guna mendukung penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka dan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah lebih lanjut. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data pajak dan data retribusi daerah..

##### **2. Sumber Data**

Selain jenis data, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa sumber data yait

###### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti baik dari pribadi (responden). Maupun dari instansi yang

mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa di bagian pajak dan retribusi daerah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau laporan pajak dan retribusi. Contohnya data yang diperoleh dari buku dan data yang diperoleh dari laporan pajak.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan *data library research* dan *field research* serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data melalui penelitian Dokumentasi, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gowa tahun 2013-2017.

#### E. Definisi Operasional Variabel Dan Variabel Operasional

1. Definisi Operasional Variabel

Pada bagian definisi operasional variabel penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya

variabel dependen (Sugiono, 2016). Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pajak dan retribusi daerah. pajak dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah.

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiono, 2016). Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Pengukuran

Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan pengambilan data yang terkait dengan pendapatan asli daerah dari Dinas pendapatan daerah Kab. Gowa. data tersebut adalah data pajak daerah dan data retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

**F. Populasi Dan Sampel**

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan data pajak dan retribusi daerah Kab. Gowa.

2. Sampel

Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah berupa data atau laporan pajak dan retribusi daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 (5 tahun), dan data laporan penerimaan pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2017 (5 tahun).

### **G. Metode analisis**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan regresi berganda. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Adapun tahap analisisnya yaitu:

1. Mengumpulkan data pendapatan asli daerah berupa data pajak dan data retribusi daerah.
2. Menghitung data pajak dan data retribusi daerah.
3. Alat uji yang digunakan yaitu dengan menggunakan perhitungan statistik dengan SPSS sebagai berikut:
  - a. Auto korelasi model
  - b. Hasil uji multikolinearitas
  - c. Uji regresi linear
  - d. Analisis determinasi koefisien

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat

Berikut ini merupakan tahun-tahun penting dalam pemerintahan Kab. Gowa di Sulawesi Selatan:

###### a. Sejarah

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

b. Masa kerajaan

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje'ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan.

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar

Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum'at untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya.

Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional

c. Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator. Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efisien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2. Visi, Misi**

### **1. Visi Badan Pendapatan Daerah.**

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal dan Akuntabel Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

### **2. Misi Badan Pendapatan Daerah.**

1. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari pendapatana lainnya.
5. Mengkoordinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
6. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
7. Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan publik.

### 3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas

#### a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Tugas Dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:

##### 1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan

dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas menyeienggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan administrasi Badan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyeienggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyeienggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian terdiri dari:

- a) Sub. Bagian Umum & Kepegawaian.
- b) Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan.
- c) Sub. Bagian Keuangan

### 3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a) Merencanakan operasional kerja bidang anggaran berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercapai kelancaran tugas.
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD.
- d) Menyella pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang Otoritas DPA-SKPD.
- e) Mengatur urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKP.
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD.

g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran

Dalam menyeienggarakan tugas bidang dibantu oleh tlg sub bidang terdlrl dari:

- a) Subbid Penyusunan APBD
- b) Subbid Pengendalian dan penatausahaan anggaran
- c) Subbid Otorltas DPA-SKPD

4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dlnas dalam mengoordlnasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyeienggarakan fungsi:

- a) Merencanakan operasional kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar terlpta kelancaran tugas.
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pemblayaan daerah serta Pengelolaan Kas Daerah.
- d) Menyelaksanaan tugas Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pemblayaan Daerah, Sub. Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dan Sub. Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- e) Mengatur urusan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pemblayaan Daerah, Pengelolaan Belanja Langsung dan Pengelolaan Kas Daerah.

- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan.

Dalam menyeienggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari:

- a) Subbid Pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah
  - b) Subbid pengelolaan belanja langsung
  - c) Subbid pengelolaan kas daerah
- 5) Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam pengelolaan pelaporan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset Daerah menyeienggarakan fungsi:

- a) Merencanakan operasional kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercapai kelancaran tugas.
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Analisa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset.
- d) Menyelaksanakan tugas Subd. Perencanaan Kebutuhan Aset, Sub. Bidang Analisa Aset dan Sub. Bidang Mutasi dan Sub. Bidang Penghapusan Aset.

- e) Mengatur urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset dan Mutasi serta Penghapusan Aset.
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset.
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan.
- h) Melaksanakan rumusan pelaksanaan Inventarisasi, pencatatan dan penllalan aset daerah.

Dalam menyeienggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari:

- a) Subbid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
  - b) Subbid Akuntansi Asset
  - c) Subbid Penyusunan Laporan Keuangan
- 6) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi menyeienggarakan fungsi:

- a) Merencanakan operasional kerja Bidang Akuntansi berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercapai kelancaran tugas.

- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- d) Menyetujui pelaksanaan tugas Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Sub. Bidang Akuntansi Aset dan Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- e) Mengatur urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- g) Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Akuntansi;
  - ★ Dalam menyeienggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari:
    - a) Subbid Perencanaan Kebutuhan
    - b) Subbid Analisa Aset
    - c) Subbid Mutasi dan Penghapusan Aset



## B. Hasil Penelitian

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas.

Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan. Laporan PAD selalu melaporkan laporan target dan realisasi PAD dalam dua periode yaitu periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya. Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada tahun yang bersangkutan akan dipakai sebagai langkah penyusunan penelitian ini.

### 1. Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Pajak Daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ada timbal balik langsung. Terdapat tiga komponen pajak daerah dalam kebijakan laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang dapat dijabarkan pada tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**

**Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	42,751,000,000	57,153,602,844	14,402,602,844	133,69%
2014	59,040,000,000	63,143,326,430	4,103,326,430	106,95%
2015	65,030,000,000	74,023,000,000	8,993,000,000	113,82%
2016	69,648,135,430	79,021,434,236	79,021,434,236	120.32%
2017	71,813,135,430	83,140,617,999	11,890,533,906	115.77%

**Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa (2019)**

Berdasarkan tabel 4.1 komponen pajak daerah dalam kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdiri dari target pajak, realisasi pajak, selisih dan pencapaian yang timbul sebagai kebijakan laporan anggaran laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Dari data dapat disimpulkan bahwa komponen pajak daerah atas pada tahun 2013 pencapaian pajak memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi factor utama dalam penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. gowa.

**2. Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau kepentingan yang juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan. Terdapat tiga komponen retribusi dalam kebijakan laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang dijabarkan pada tabel IV.2 dibawah ini:

**Tabel 4.2**

**Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	28,285,036,699	37,208,348,059	8,990,361,361	131,55%
2014	38,093,621,411	65,745,402,114	27,651,780,703	172,59%
2015	49,189,123,000	57.356.765.000	8,167,640,000	116,60%
2016	84,196,838,547	64,454,029,027	(19,742,809,520)	76.55%
2017	74,151,242,311	50,910,398,136	(22,895,144,175)	68.66%

**Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa (2019)**

Berdasarkan tabel 4.2 komponen retribusi daerah dalam kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdiri dari target retribusi, realisasi retribusi, selisih dan pencapaian yang timbul sebagai kebijakan laporan anggaran laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Dari data dapat disimpulkan bahwa komponen retribusi daerah atas pada tahun 2014 pencapaian retribusi memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi factor utama dalam penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. gowa.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa komponen pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi factor utama dalam kenaikan dan penurunan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. gowa.

**3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Terdapat tiga komponen PAD dalam kebijakan laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang dijabarkan pada tabel IV.3 dibawah ini:

**Tabel 4.3**

**PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa  
Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	PAD			
	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	80,129,433,187	108,745,838,574	28,683,455,387	133,69%

2014	107,044,621,411	149,354,075,782	42,309,454,372	139,53%
2015	123,768,120,000	152,676,240,000	28,908,120,000	123,35%
2016	159,979,473,977	158,225,234,995	(1,806,396,917)	98,90%
2017	158,736,717,761	149,631,191,231	(8,295,480,445)	94,26%

**Sumber data: laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa (2019)**

Berdasarkan tabel 4.2 komponen pendapatan asli daerah dalam kebijakan BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, terdiri dari target PAD, realisasi PAD, selisih dan pencapaian yang timbul sebagai kebijakan laporan anggaran laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa. Dari data dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan asli daerah atas pada tahun 2014 pencapaian PAD yang memiliki proporsi yang paling besar sehingga dapat menjadi faktor utama dalam penerimaan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah pada BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa mengalami pasang surut dikarenakan pendapat di sektor distribusi mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2017.

### **C. HASIL UJI DATA**

#### **1. Auto Korelasi Model**

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam model regresi dimana variabel independen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variabel independen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi dilakukan dengan Durbin-Watson.

Uji Durbin Watson (DW Test) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (constant) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan di Uji adalah :  $H_0$  = tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data Pengamatan  $H_a$  = terjadi adanya autokorelasi di antara data Pengamatan. Adapun hasil perhitungan korelasi menggunakan spss 16.0 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.864	2.76604E9	1.880

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa angka Durbin-Watson sebesar 1,880 nilai akan di bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5%. Hal ini berarti adanya korelasi antara variabel X dan variabel Y.

Hasil pengujian ini menunjukkan nilai  $r > 0$  dan  $< 1$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif dan searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan variabel dependen. Nilai Durbin Watson mengindikasikan tidak adanya autokorelasi yang terjadi yang

diindikasikan dengan nilai 1,880. Maka, dari hasil uji Durbin Watson di atas maka  $H_0$  diterima karena tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance dan VIF serta model dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai VIF tidak ada yang melebihi angka 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	.852	1.173
Retribusi Daerah	.852	1.173

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

### Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai tolerance untuk penerimaan Pajak Daerah adalah 0,852 dan penerimaan Retribusi Daerah adalah 0,852. Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance

kurang dari 10%. Sedangkan hasil perhitungan nilai VIF penerimaan Pajak Daerah adalah 1,173 dan penerimaan Retribusi Daerah adalah 1,173. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10.

### 3. Uji Regresi linear

**Tabel 4.6**  
**Hasil Perhitungan Regresi linear Melalui SPSS 16.0**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	1.4373E11	1.98777E10
Pajak Daerah	7.1296E10	1.08845E10
Retribusi Daerah	5.5135E10	1.16573E10

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.4373E11,- (pembulatan) dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.98777E10,- (pembulatan), artinya jika dihubungkan dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 1.4373E11,- maka PAD akan berkisar antara Rp. 1.4373E11,- ± Rp. 1.98777E10,-

Rata-rata Pajak Daerah rata-rata Rp.7.1296E10 (pembulatan) dengan standar deviasi sebesar Rp.1.08845E10 (pembulatan) dan Retribusi Daerah dengan rata-rata Rp.5.5135E10 (pembulatan) dan standar deviasi sebesar Rp.1.16573E10 (pembulatan). Jawaban yang diberikan untuk kedua variabel bebas cukup berkontribusi terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Melalui SPSS 16**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.469E10	1.324E10		1.110	.383
	Pajak Daerah	.896	.187	.491	4.784	.041
	Retribusi Daerah	1.181	.175	.693	6.750	.021

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

Dari hasil pengolahan data tersebut pada tabel 4.7, maka dapat diketahui Menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan PAD yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

$$Y = 1.469E10 + 0,896 X1 + 1.181X2$$

Y adalah PAD, X1 adalah Pajak Daerah, dan X2 adalah Retribusi Daerah.

Dari persamaan di atas, dapat dianalisis beberapa hal, antara lain:

- PAD, jika tanpa adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( $X1$  dan  $X2 = 0$ ), maka PAD hanya sebesar  $1.469E10$ . maka diperkirakan PAD akan naik.
- Koefisien regresi berganda sebesar  $X1$  sebesar  $0,896$  dan  $X2$  sebesar  $1.181$  mengindikasikan bahwa besaran penambahan PAD setiap pertambahan untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Persamaan regresi berganda  $Y = 1.469E10 + 0,896 X1 + 1.181 X2$ , yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan PAD yang

dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan di uji apakah valid untuk digunakan

#### 4. Analisis Determinasi Koefisien

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari hasil penghitungan sebelumnya pada tabel 4.4,  $r$  Square adalah 0,882. Hal ini berarti koefisien determinasi yaitu sebesar 0,982 atau 98,2%. Dari penghitungan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 98,2%. Sedangkan sisanya 1,8% merupakan besarnya pengaruh dari faktor lain di luar kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

#### D. Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 98,2%. Ini berarti bahwa kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu hipotesis dalam penelitian ini diterima

Hasil uji auto korelasi model, pengujian ini menunjukkan nilai  $r > 0$  dan  $< 1$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif dan searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan variabel dependen. Nilai Durbin Watson mengindikasikan tidak adanya autokorelasi

yang terjadi yang diindikasikan dengan nilai 1,880. Maka, dari hasil uji Durbin Watson di atas maka  $H_0$  diterima karena tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan. Penelitian ini pun didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi Nugroho (2013), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi kurniawan (2014), dengan hasil penelitian menunjukkan pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil uji multikolinearitas, Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai tolerance untuk penerimaan Pajak Daerah adalah 0,852 dan penerimaan Retribusi Daerah adalah 0,852. Hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10%. Sedangkan hasil perhitungan nilai VIF penerimaan Pajak Daerah adalah 1,173 dan penerimaan Retribusi Daerah adalah 1,173. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10, dan tidak ada penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Hasil uji Regresi linear, Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.4373E11,- (pembulatan) dengan standar deviasi sebesar Rp. 1.98777E10,- (pembulatan), artinya jika dihubungkan dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 1.4373E11,- maka PAD akan berkisar antara Rp. 1.4373E11,-  $\pm$  Rp. 1.98777E10,-

Rata-rata Pajak Daerah rata-rata Rp.7.1296E10 (pembulatan) dengan standar deviasi sebesar Rp.1.08845E10 (pembulatan) dan Retribusi Daerah dengan rata-rata Rp.5.5135E10 (pembulatan) dan standar deviasi sebesar Rp.1.16573E10 (pembulatan). Jawaban yang diberikan untuk kedua variabel bebas cukup berkontribusi terhadap variabel terikat, penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2017), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil Analisis determinasi koefisien, Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dari hasil penghitungan sebelumnya pada tabel 4.4, r Square adalah 0,882. Hal ini berarti koefisien determinasi yaitu sebesar 0,982 atau 98,2%. Dari penghitungan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 98,2%. Sedangkan sisanya 1,8% merupakan besarnya pengaruh dari faktor lain di luar kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggar Kusuma & Putu Wirawati (2013), hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh sebesar 84,9% sedangkan retribusi daerah berpengaruh sebesar 16,6%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Dokumentasi, serta analisis yang telah diuraikan, serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh yang positif dan signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan besarnya pengaruh kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 98,2% sedangkan sisanya 1,8% merupakan besarnya pengaruh dari faktor lain di luar kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini dikarenakan oleh semakin meningkatnya perkembangan pembangunan yang didasari peningkatan penerimaan realisasi pajak-pajak setiap tahunnya

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan beberapa saran untuk menyajikan penelitian yang lebih berkualitas di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah kabupaten/kota. Contohnya: Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana khusus alokasi khusus.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, memperluas daerah survei dan memperbanyak ragam sampel sehingga data yang diperoleh lebih valid.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan pendapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sehingga objek penelitian lebih berkualitas.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempersiapkan biaya, mempersiapkan lebih banyak waktu dan tenaga agar proses penelitian berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan tepat waktu dalam penyajiannya sehingga hasil penelitian lebih berkualitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2001). *Akuntansi Bank Dan Syariah* . jakarta: Gema Insani.
- Badan pendapatan Daerah, 23 maret, pukul 10:30
- Dwi kurniawan. (2014). pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli di kabupaten ponorogo. *jurnal akuntansi*, 9.
- Hasibuan, m. (2014)pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penerimaan pendapatan asli daerah bagi daerah kabupaten/kota . *jurnal ilmiah "advokasi" vol 02 no 02*, 95.
- Hikmah. (2017). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota batam. *Jurnal of goverment - JOG Volume 2*, 162.
- Hutagaol, R. M. (2012). penerapan akuntansi pada usaha kecil menengah . *jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi vol 1 No 2 maret*, 57.
- Ifa, K. (2017). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendaptan asli daerah di kab jember *kontribusi pajak vol 1*, 3-4.
- Kasasih, D., & Murniati, S. ( 2017). analisis kontribusi dan efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota palembang . *Jurnal Kompetitif Vol.6 No. 1* , 88-89.
- kurnia fikriningrum. (2014). analisis faktor faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *perpajakan*, 10.
- Kurniawan, S. (2014). Pengaruh penerimaan pajak dan retribusi. *skripsi jadi*, 13-18.
- Kusuma & Wirawati. (2013). analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan tertibusi daerah terhadap peningkatan PAD. *akuntansi*, 9.
- Nugroho, A. (2013). analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi jawa periode 2012-2013. *jurnal akuntansi*, 6.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. (2014). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan daderah kota batu. *Jurnal administrasi bisnis*[vol 15 no. 1 oktober, 3.

Pertiwi, R., Azizah, D., & Kurniawan, B. (2014). analisis efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (studi pada Dinas pendapatan, keuangan dan aset kota probolinggo). *jurnal perpajakan vol 3 No. 1 november*, 2.

Puspita dewi, Y., & Hidayati, H. d. (2016). analisis efektifitas pajak daerah atas pendapatan asli daerah pada badan pelayanan pajak daerah kota malang. *jurnal perpajakan*, 3.

Susilawati, E., & Riharjo, I. (2014). pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi belanja daerah. *Jurnal ilmu dan riset manajemen*, 5.

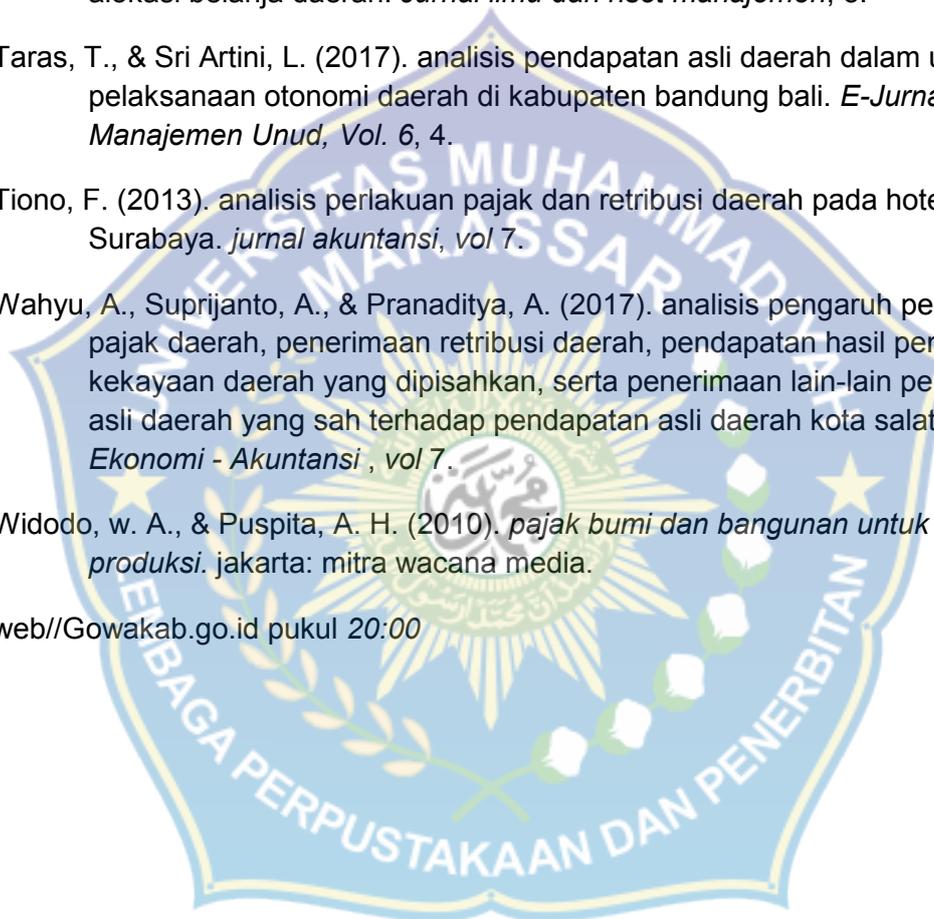
Taras, T., & Sri Artini, L. (2017). analisis pendapatan asli daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten bandung bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6*, 4.

Tiono, F. (2013). analisis perlakuan pajak dan retribusi daerah pada hotel "X" di Surabaya. *jurnal akuntansi, vol 7*.

Wahyu, A., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). analisis pengaruh penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kota salatiga. *Ekonomi - Akuntansi*, vol 7.

Widodo, w. A., & Puspita, A. H. (2010). *pajak bumi dan bangunan untuk pajak produksi*. jakarta: mitra wacana media.

web//Gowakab.go.id pukul 20:00





**Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisi	%
2013	42,751,000,000	57,153,602,844	14,402,602,844	133,69%
2014	59,040,000,000	63,143,326,430	4,103,326,430	106,95%
2015	65,030,000,000	74,023,000,000	8,993,000,000	113,82%
2016	69,648,135,430	79,021,434,236	79,021,434,236	120,32%
2017	71,813,135,430	83,140,617,999	11,890,533,906	115,77%

Sumber data: laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



**Tabel 4.2**  
**Retribusi Daerah BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisi	%
2013	28,285,036,699	37,208,348,059	8,990,361,361	131,55%
2014	38,093,621,411	65,745,402,114	27,651,780,703	172,59%
2015	49,189,123,000	57.356.765.000	8,167,640,000	116,60%
2016	84,196,838,547	64,454,029,027	(19,742,809,520)	76.55%
2017	74,151,242,311	50,910,398,136	(22,895,144,175)	68.66%

Sumber data: laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa

**PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017**

Tahun	PAD			
	Target	Realisasi	Selisi	%
2013	80,129,433,187	108,745,838,574	28,683,455,387	133,69%
2014	107,044,621,411	149,354,075,782	42,309,454,372	139,53%
2015	123,768,120,000	152,676,240,000	28,908,120,000	123,35%
2016	159,979,473,977	158,225,234,995	(1,806,396,917)	98,90%
2017	158,736,717,761	149,631,191,231	(8,295,480,445)	94,26%

Sumber data: laporan PAD BadanPendapatan Daerah Kab. Gowa (2019)



## 1. Auto Korelasi Model

### Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 <sup>a</sup>	.982	.864	2.76604E9	1.880

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

## 2. Hasil Uji Multikolinearitas

3. Tabel 4.5

### Hasil Perhitungan Korelasi Melalui SPSS 16.0

Model	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.852	1.173
	Retribusi Daerah	.852	1.173

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Sumber Data: Hasil Olahan Data (2018)**

## 2. Uji Regresi linear

Tabel 4.6

### Hasil Perhitungan Regresi linear Melalui SPSS 16.0

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	1.4373E11	1.98777E10
Pajak Daerah	7.1296E10	1.08845E10
Retribusi Daerah	5.5135E10	1.16573E10

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisa Regresi Melalui SPSS 16**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.469E10	1.324E10		1.110	.383
	Pajak Daerah	.896	.187	.491	4.784	.041
	Retribusi Daerah	1.181	.175	.693	6.750	.021

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

**Sumber Data: Hasil Olahan Data 2018**

